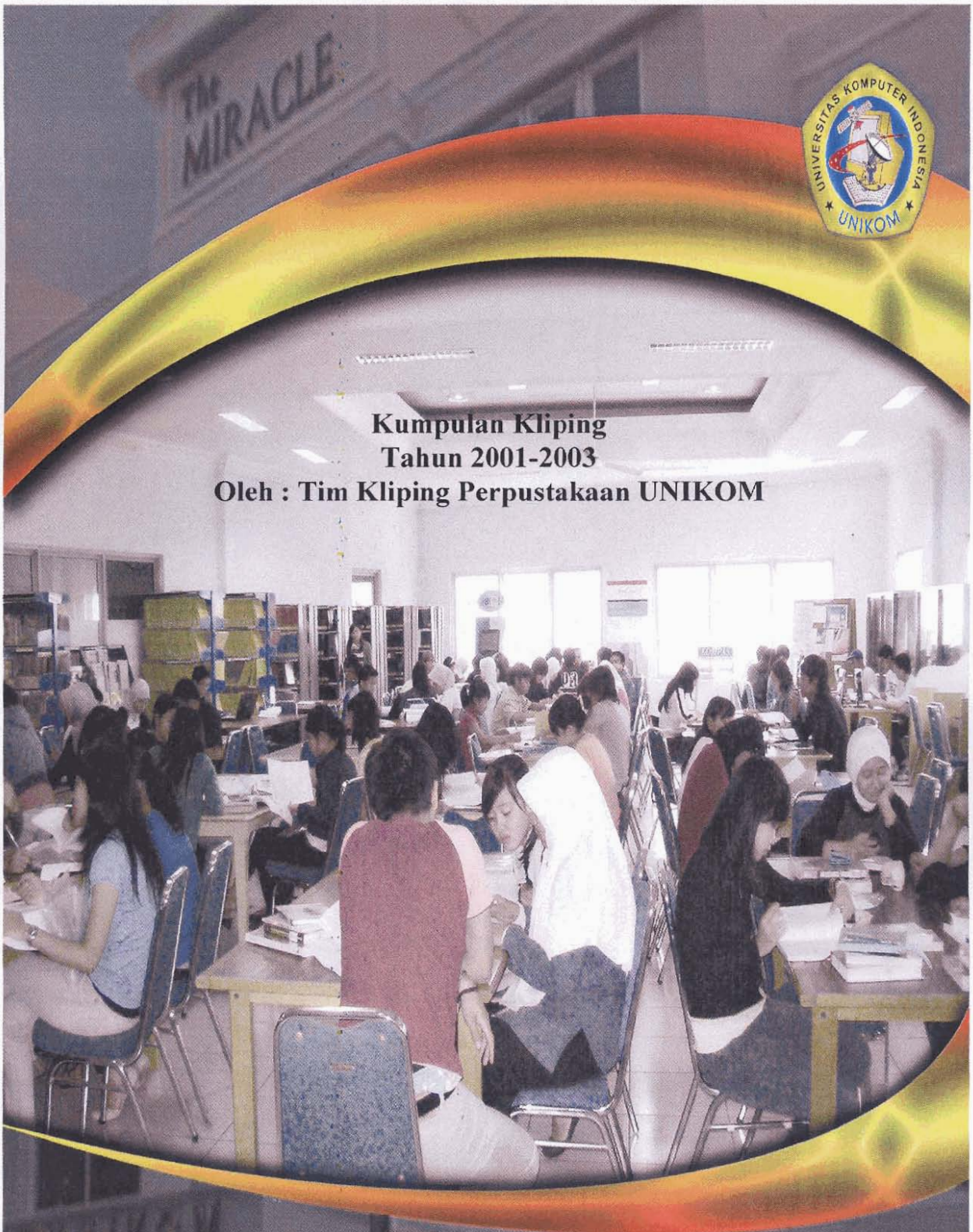


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 36 / 6-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : YUDHISTIRA, COKORDA
No_Klass/Subjek : PARIWISATA / 338.5

Pariwisata Pulih Dulu, Baru Properti

DUA lembar spanduk bertulis "for sale" menghiasi sebuah kompleks rumah kantor (rukan) tiga lantai di kawasan Civic Center Renon, Denpasar. Sementara pada sisi dalam jendela salah satu rukan tersebut terpampang papan tripleks putih bertulis "dikontrakkan". Warna coklat cat bangunan itu terlihat kusam dan di beberapa sudutnya mulai ditumbuhi lumut hijau. Bangunan bergaya arsitektur modern ini tampak kontras dengan gedung kantor di seberangnya yang dibangun dengan arsitektur Bali.

Gedung ini sudah selesai dibangun dua tahun lalu, tetapi baru beberapa hari ini dipasangi spanduk itu," ujar seorang bapak tua yang membuka usaha tambal ban di trotoar depan bangunan yang (seharusnya) mewah itu. Ia kemudian kembali sibuk menambal ban sepeda motor calon pelanggannya.

Di sebuah sudut kompleks perumahan mewah, masih di kawasan Renon, sebuah papan tripleks seukuran pelat nomor kendaraan dipaku pada sebatang pohon akasia di pinggir. Gambar segi tiga dengan kotak segi empat di bawahnya dilukis pada papan tersebut beserta tulisan putih "Rumah Dijual. Hubungi 0361XXXXX".

Pemandangan seperti itu lazim ditemui di Kota Denpasar atau kota-kota lainnya di Bali. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan terbatasnya lahan, penyediaan kebutuhan papan menjadi hal yang semakin mahal namun tetap diperlukan. Tidak mengherankan, sebidang tanah sawah yang dulunya hijau oleh padi, dalam sekejap beralih rupa dipenuhi semen, pasir serta kapur, dengan sebuah papan bertulis "IMB No XXXXX".

"SEBELUM peristiwa bom, dalam sebulan lima unit rumah saku terjual. Mulai dari harga termurah Rp 150 juta sampai rumah besar seharga Rp 500 juta. Sekarang, kami hanya menjual beberapa unit sejak peristiwa itu," ujar Sales Marketing WIN WIN Property di Denpasar, Martinus Santoso, ketika dihubungi hari Selasa (18/2) lalu.

Menurut dia, tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 lalu sangat mempengaruhi transaksi jual beli sektor ini. "Sekarang orang masih pikir-pikir melepas uang," lanjut karyawan agen *broker* properti itu.

Kondisi serupa juga diakui Direktur Operasional Century 21 Graha, Teddy Kurniawan. Sebagai perusahaan yang menjual jasa penghubung, tragedi bom Bali membuat bisnis mereka lesu. Terlebih, pangsa pasar mereka sebelumnya diarahkan ke para ekspatriat asing *yang ingin berbisnis atau* sekadar tinggal sementara di Bali. "Pangsa asing anjlok, kami mengarah ke pasar lokal.

Sebelum peledakan bom terjadi menjelang akhir tahun 2002, jasa *broker* properti dan pengembang (developer) sedang bergairah karena lancarnya investasi yang masuk ke Bali. Menurut Teddy, sebelum peristiwa bom Bali, kue pasar properti dibagi berimbang antara ekspatriat dan lokal. Namun, peledakan bom menyebabkan pangsa pasar ekspatriat tinggal sekitar 30 persen, sementara 70 persen lainnya dikuasai lokal, terutama masyarakat menengah ke bawah. "Ukuran ini masih *average* (rata-rata) kasar," ujarnya.

Sejumlah kawasan sempat menjadi tambang emasnya usaha properti, di antaranya kawasan Kuta, Nusa Dua, dan Kota Denpasar. Lahan yang terbatas menjadi rebutan sehingga harga tanah di kawasan tersebut melambung dibandingkan dengan kawasan lainnya.

"Sekitar 70 persen andalan Bali ialah pariwisata, sehingga industri pariwisata mendukung pendapatan per kapita masyarakat Bali. Dengan rasio gaji waktu (sebelum peledakan bom) itu, beralasan bagi masyarakat membeli rumah dengan mencicil sehingga bisnis properti berjalan," ungkap Ketua Real Estat Indonesia (REI) Bali I Putu Parwata.

Ketika bom meledak, pariwisata Bali terpuruk ke titik terendah. Kunjungan wisatawan yang semula mencapai 7.000 orang sampai 7.500 orang per h[illegible] melorot [illegible] mencapai angka 784 orang per hari.

Akibatnya, pemasukan dari sektor pariwisata itu praktis seret.

"Masyarakat tidak sempat berpikir membeli rumah, mereka harus memenuhi kebutuhan dasar. Yang jelas, sektor menengah ke bawah sulit bergerak karena pengaruh penurunan pendapatan per kapita tersebut," kata Parwata. Dampaknya, keuntungan yang menurut rencana diperoleh perusahaan ikut tertunda.

"Pengusaha properti tidak rugi, hanya mengalami penurunan omzet, sebab barang kami tidak ada yang hilang," lanjut ketua dari 120 pengusaha real estat di Bali ini. Ia mengakui, perusahaannya mengadakan transaksi penjualan sedikitnya satu kali dalam sebulan. "Sekarang, sampai dua bulan *belum tentu ada*," ujar Parwata.

Selain diganjal penundaan pembelian tempat tinggal, rencana pengembangan lainnya pun turut terhambat karena calon rekanan investor mereka memilih menunda atau bahkan membatalkan rencana mereka menanam modal di Bali dengan alasan keamanan. "Ada sekitar lima orang kawan-kawan saya yang dibatalkan calon rekanannya. Nilai investasinya, ratusan milyar rupiah," ujar Parwata.

DEMIKIAN eratnya keterkaitan antara industri pariwisata dan sektor-sektor lain di luar pariwisata sehingga hentakan terhadap sektor jasa ini mampu mengerem bahkan menghentikan laju sektor lainnya, termasuk usaha properti. "*Tourism is nothing but it's everything*," ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengibaratkan betapa berpengaruhnya sektor pariwisata terhadap sektor di luarnya.

Menurut Pitana, pemasukan dari pariwisata tidak bedanya setetes air yang jatuh di sebuah kolam air. Kecil tetapi mampu menimbulkan lingkaran lebar di sekelilingnya walaupun semakin ke tepian semakin melemah. "Tidak ada sektor lain yang bisa dilepaskan dari pariwisata. Satu contoh nyata, kedatangan wisatawan mempunyai *backward and upward linked*," kata Pitana.

Artinya, setiap gemerincing *dollar* yang masuk ke Bali akan menggerakkan motor industri mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Keterpurukan yang dialami sektor pariwisata akibat ledakan bom tidak hanya menghentikan aktivitas industri yang berhubungan langsung dengan pariwisata namun juga memperlambat kegiatan di sektor lain, mulai dari pertanian sampai buruh angkut.

Seiring dengan membaiknya kondisi keamanan di Bali, terlebih dengan tertangkapnya para tersangka peledakan bom, para pengusaha properti dan agen *broker* properti juga mengharapkan adanya perbaikan kondisi sektor real ini. "Harapan saya, dalam dua bulan ke depan ini akan membaik. Jangan lama-lama begini," kata Parwata.

Harapan serupa juga disampaikan Pitana. Dengan jumlah kunjungan wisatawan langsung mencapai 2.100 orang per hari dan tingkat hunian hotel rata-rata 27 persen di seluruh Bali, Pitana memperkirakan kondisi pariwisata Bali akan pulih dalam dua bulan ke depan.

"Kalau sampai lewat bulan Juni belum membaik, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Perkiraan saya, bulan April kondisi akan normal. Ini dari segi kedatangan wisatawan. Biasanya, ekonom akan normal setelah tiga bulannya," kata Pitana tanpa memperhitungkan kemungkinan pecahnya Perang AS-Irak. Kembali mengutip istilah Pitana tentang setetes air di tengah kolam yang tenang, maka sektor-sektor barang dan jasa yang lebih dekat dengan sumber pariwisata, yakni berkaitan langsung dengan kedatangan wisatawan, akan terlebih dahulu akan bereaksi positif. Sementara, sektor riil seperti properti, yang berada agak jauh dari sentral gelombang, harus menunggu sedikit lebih lama.

(COKORDA YUDHISTIRA)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 15 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 15 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : PENGANGGURAN / 331.13

Penganggur, Bermasalah sejak Definisi

SALAH satu pertanda perubahan struktur ekonomi sebuah negara adalah perubahan dalam struktur ketenagakerjaan, baik dalam lapangan usaha, status, maupun jenis pekerjaan. Ketenagakerjaan terkait pula dengan pengangguran. Namun demikian, mendapatkan angka tepat mengenai jumlah pengangguran bukan pekerjaan mudah.

MENURUT data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kecenderungan naik sejak tahun 1997 hingga 1999 dan sedikit menurun pada tahun 2000. Tingkat pengangguran pada tahun 2000 tercatat sebesar 6,14 persen, sedangkan tahun 1999 sebesar 6,36 persen.

Pihak BPS sendiri menyatakan belum mempublikasikan berapa tepatnya jumlah pengangguran di tahun 2000. Tingkat pengangguran tersebut dinyatakan sebagai persentase dari penjumlahan banyaknya penganggur terbuka dan setengah penganggur terpaksa terhadap banyaknya orang yang tercakup sebagai angkatan kerja.

Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga semakin meningkat. Angka pada tahun 2000 menunjukkan 67,72 dibandingkan 67,22 persen pada 1999. Tingkat partisipasi ini menunjukkan semakin banyaknya orang yang siap bekerja. Biasanya, jika tingkat pengangguran meningkat, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat.

Masalah pengangguran tidak hanya terlihat dari banyak atau sedikitnya pengangguran di Indonesia. Permasalahan ini telah dimulai dari definisi yang digunakan untuk menyatakan apakah seseorang merupakan pengangguran atau pekerja.

Definisi bekerja sangat longgar sehingga batas antara orang yang bekerja dan pengangguran tipis. Orang dikatakan telah bekerja jika telah melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam satu jam secara tidak terputus selama satu minggu yang lalu. Definisi ini berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, tergantung dari keadaan negara tersebut, terutama dalam menentukan berapa jam seseorang dapat digolongkan menjadi kelompok yang telah bekerja.

Dengan minimnya jam kerja yang dipersyaratkan dalam definisi ini, sangat banyak orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Dalam angka kelompok pengangguran terlihat lebih sedikit dari keadaan nyatanya. Dapat saja jumlah penganggur di Indonesia dalam angka terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan negara tetangga. Padahal kenyataannya tidak demikian, secara riil mungkin saja sebenarnya jumlah pengangguran lebih tinggi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena standar minimum jam bekerja di negara lain lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang digunakan di Indonesia.

Salah seorang sumber di BPS mengatakan, pada krisis moneter lalu dalam data sempat terlihat jumlah pengangguran di DKI Jakarta justru menurun, padahal pada saat itu sempat ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan jumlah pengangguran ini disebabkan para korban PHK yang kemudian bekerja pada sektor informal, misalnya membuka kafe-kafe di masa krisis serta tidak jarang mengajak keluarganya. Jika menuruti definisi di atas, satu jam bekerja dalam satu minggu saja telah termasuk dalam kelompok bekerja.

◆◆◆

KONSEP pengangguran dan setengah pengangguran merujuk pada dua situasi yang berbeda. BPS dalam buku *Pengembangan Metode Penghitungan Pengangguran* mendefinisikan pengangguran merujuk pada keadaan seseorang yang menghadapi ketiadaan pekerjaan. Setengah pengangguran merujuk pada situasi pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan keterampilan dan pengalaman bekerja orang yang bersangkutan tidak memenuhi aturan-aturan atau norma-norma pekerjaan yang telah ditetapkan.

Dari kedua konsep tersebut terungkap bahwa pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan setengah pengangguran merujuk pada ketidakpuasan seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya.

Kondisi setengah pengangguran terbagi lagi menjadi dua keadaan, yaitu setengah pengangguran kentara dan setengah pengangguran tidak kentara. Setengah pengangguran kentara (*visible underemployment*) mencerminkan ketidak-

cukupan dalam volume pekerjaan, sedangkan setengah penganggguran tidak kentara (*invisible underemployment*) mencerminkan ketidaktepatan penempatan sumber daya manusia atau ada ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi.

Sebagai perbandingan, Organisasi Buruh Internasional (ILO-International Labour Organization) juga mengeluarkan definisi baku tentang pengangguran dan setengah pengangguran.

Definisi ini disusun atas tiga kriteria, yaitu tidak bekerja, bersedia bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Penganggur didefinisikan sebagai seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Orang yang termasuk dalam kelompok ini disebut penganggur terbuka atau penganggur penuh (*open unemployment*).

BPS mengikuti ILO dalam mendefinisikan penganggur terbuka, tetapi kriteria bersedia menerima pekerjaan tidak dicantumkan. Sehingga definisi penganggur terbuka menurut BPS menjadi seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja, tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan.

Selanjutnya, ILO juga menyusun definisi baku mengenai setengah penganggur kentara yang disusun atas tiga kriteria yaitu bekerja kurang dari jam normal, melakukan pekerjaan dengan terpaksa, masih mencari pekerjaan, atau masih bersedia menerima pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan.

Berdasarkan kriteria tersebut, ILO mendefinisikan setengah penganggur kentara adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri atau berusaha sendiri yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan.

BPS belum menerapkan definisi internasional tentang setengah pengangguran. Selama ini, setengah penganggur di Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang selama periode tertentu bekerja kurang dari jam normal. Jam kerja normal ditetapkan sebanyak 35 jam per minggu. Definisi ini tidak hanya mencakup buruh atau karyawan dan pekerja mandiri, tetapi juga mencakup pengusaha baik dibantu anggota keluarga maupun dibantu pekerja yang dibayar.

Masalah yang timbul kemudian adalah penghitungan dengan definisi seperti itu menimbulkan angka yang lebih besar dari angka seharusnya. Hal ini terjadi karena perhitungannya masih mencakup sejumlah orang yang memang secara sukarela bekerja di bawah jam kerja normal.

◆◆◆

MULAI tahun 1999, BPS menyempurnakan definisi setengah penganggur dengan menambahkan dan mengurangi kriteria yang disarankan ILO. Kriteria tersebut adalah tentang mencari pekerjaan atau masih menerima pekerjaan lain sedangkan kriteria yang dikurangi adalah keterpaksaan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Definisi setengah penganggur menjadi orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih menerima pekerjaan lain. Kelompok ini juga disebut setengah penganggur terpaksa.

Kelompok lain adalah orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Kelompok ini disebut juga setengah penganggur sukarela.

BPS juga menyatakan angka penganggur di Indonesia sebagai penjumlahan banyaknya orang yang termasuk dalam penganggur terbuka dengan banyaknya orang yang termasuk setengah penganggur terpaksa.

Perbedaan definisi ini akhirnya menyebabkan perbedaan hasil perhitungan. Jika mengikuti cara lama, (**tabel 1**). Banyaknya penganggur yang mencakup setengah penganggur terpaksa, (**tabel 2**). Adanya perbedaan tersebut menunjukkan data setengah penganggur di Indonesia lebih banyak dan mengandung angka *over estimate* karena tercakupnya sejumlah orang yang secara sukarela bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan menurut BPS tidak selayaknya mereka dikelompokkan ke dalam penduduk yang mempunyai masalah ketenagakerjaan.

BPS juga mengakui kriteria yang mereka terapkan untuk mendapatkan definisi mengenai pengangguran dan setengah pengangguran. Kontroversi tersebut antara lain adalah mengenai kriteria mencari pekerjaan selama ini hanya menekankan usaha penduduk yang mencari pekerjaan untuk dibayar. Artinya, kriteria ini belum dapat mencakup penduduk yang ingin berusaha sebagai pekerja sendiri.

Mengenai penetapan jam kerja, setidaknya ada dua permasalahan yang mengemuka yaitu batas jam kerja normal hanya dapat diterapkan untuk buruh atau karyawan yang jam kerjanya telah ditentukan undang-undang, sedangkan batas jam kerja normal selain buruh dan karyawan tidak dapat berlaku umum untuk setiap pekerjaan.

Batas kerja normal juga tidak dapat diberlakukan untuk seluruh lapangan pekerjaan karena jam kerja yang bervariasi antara lapangan pekerjaan satu dengan lainnya. **(joe)**

PENGANGGUR DI INDONESIA

Tabel 1

Banyaknya Penganggur di Indonesia 1997-1999 (dalam ribuan orang)



Tabel 2

Banyaknya Penganggur di Indonesia 1997-1999 (dalam ribuan orang)



Keterangan: Penduduk berumur 15 tahun ke atas. Tidak termasuk Timor Timur
Sumber: Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Populasi dan Jenis Aktivitas

Jenis	1997	1998	1999	2000
Penduduk di atas 15 tahun	135.070.350	138.556.198	141.096.417	141.312.722
Angkatan kerja	89.602.835	92.734.932	94.847.178	95.695.979
Tingkat partisipasi angkatan kerja	(66,34)	(66,63)	(67,22)	(67,72)
Bekerja	85.405.529	87.672.449	88.816.859	89.824.023
Mencari pekerjaan	4.197.306	5.062.483	6.030.319	5.871.956
Bukan angkatan kerja	45.467.515	45.821.266	46.249.239	45.614.743
Pelajar	10.814.356	11.273.682	10.934.731	10.811.539
Ibu rumah tangga	25.896.013	25.266.906	25.857.621	25.333.554
Lain-lain	8.757.146	9.280.678	9.456.887	9.471.650

Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 5-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul ~~Artikel~~/ Berita : REVISI APBN Dibahas Di Rapat Ekonomi Terbatas
SUBJEK : TNO KLASS : ANGGARAN PEEH/DISPATAH BELANJA DAN NEGARA 359.72

Revisi APBN Dibahas di Rapat Ekonomi Terbatas

Jakarta, Kompas

Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2001 yang sudah dikaji kembali dalam rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian, Selasa lalu, akan dibawa ke pembahasan rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Rabu (9/5) ini.

Selanjutnya, revisi APBN 2001 akan kembali dibahas dalam rapat kabinet yang akan dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Kamis besok. Dari sini, baru revisi APBN tersebut akan diajukan ke DPR.

"Tadi kita *review*, kita bahas lagi. Besok Rabu, pukul 10.00, revisi itu akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Wapres Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, akan dibahas lagi dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden," ujar Rizal Ramli, sebelum dimulainya rapat Panitia Kerja (Panja) Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) di Gedung DPR, Selasa malam.

Ditanya *Kompas* apakah pemerintah akan mengubah besaran defisit dari 3,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 3,7 persen dari PDB sebagaimana pernah disampaikannya beberapa pekan lalu, Rizal menyatakan tidak. "Itu tetap," katanya.

Mengenai kemungkinan perubahan besaran defisit APBN menjadi 3,8 persen dari PDB akan menjadi masalah baru dengan Dana Moneter Internasional (IMF)—mengingat karena sebelumnya kedua pihak telah menyepakati defisit sebesar 3,7 persen—, Rizal tak menjawab. "Itu tanya Menteri Keuangan. Saya *no comment*."

Tak berbeda

Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution, usai rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian, Selasa, menyatakan, besaran revisi APBN tahun 2001 masih terus dikaji secara mendalam. "Kami tadi hanya menyisir saja angka-angkanya," ujarnya.

Menurut Nasution, besaran revisi APBN 2001 yang dibahas dalam rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian tidak terlalu jauh berbeda dengan besaran angka-angka revisi yang sebelumnya sudah dilansir.

Meski belum disampaikan, untuk sementara tim anggaran Depkeu menetapkan angka defisit anggaran sebesar Rp 56 trilyun lebih atau sebesar 3,8 persen dari PDB. Peningkatan besaran defisit anggaran dari angka revisi sebelumnya sebesar Rp 53,8 trilyun atau 3,7 persen dari PDB itu disebabkan karena perubahan penerimaan dan pengeluaran, selain juga perubahan langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran. (*Kompas*, 4/5)

Sebelumnya, dalam APBN 2001 yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR akhir April lalu, defisit APBN 2001 ditetapkan sebesar Rp 52,5 trilyun atau 3,7 persen dari PDB. Angka inilah yang kemudian disepakati bersama oleh pemerintah dan IMF.

Sementara, untuk besaran asumsi dasar atau variabel ekonomi makro APBN 2001, masih tetap sama seperti yang pernah diumumkan sebelumnya oleh pemerintah. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp 9.600, pertumbuhan ekonomi 3,5 persen, tingkat inflasi 9,3 persen, harga minyak mentah dunia sebesar 24 dollar As per barrel, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan sebesar 15 persen.

Dalam revisi APBN tahun 2001 yang akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Wapres Megawati, ditetapkan besaran penerimaan negara menjadi Rp 284, 726 trilyun (sebelumnya Rp 283,343 trilyun) atau 19,3 persen dari PDB. Sementara pengeluaran negara mencapai Rp 341,060 trilyun (sebelumnya Rp 340,599 trilyun) atau 23,2 persen dari PDB.

"Perubahan besaran ini juga dipengaruhi oleh perubahan sejumlah *policy measures* yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah dalam mengatasi defisit APBN," kata Nasution.

Langkah-langkah itu di antaranya tidak jadinya saham-saham BUMN dilepas dan dijualnya aset-aset milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta langkah-langkah lain yang masih harus dikaji lebih lanjut. Sementara volume total PDB pada APBN tahun 2001 juga direvisi, dari sebelumnya Rp 1.425 trilyun ditingkatkan menjadi Rp 1.468,1 trilyun.

Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Abdullah Zainie, pemerintah hingga saat ini masih membicarakan secara intensif besaran angka revisi APBN tahun 2001, di antaranya menyangkut *penerimaan pajak yang* akan ditingkatkan dari Rp 179,892 trilyun menjadi Rp 189,012 trilyun. Penerimaan itu dilakukan dengan cara meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebesar Rp 48,853 trilyun menjadi sebesar Rp 67,288 trilyun. **(har/joe)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 16 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 15 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KWIK, KIAN GIE
Subjek : BANK DAN PERBANKAN 1332.1
I NO. KLASS

Tidak Ada Bank Sentral yang Independen Mutlak

TIBA-tiba saja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) menjadi masalah, sehingga dirasa perlu untuk diamandemen. Ketika proses amandemen sedang berlangsung, para pengamat sangat gaduh menyatakan kerisauannya bahwa UU BI—yang dianggap sudah bagus karena sudah sangat independen itu—akan dibuat tidak independen lagi.

LALU, Dana Moneter *Internasional (IMF)* menghentikan proses amandemen yang sedang berlangsung di parlemen. IMF bersitegang bahwa harus ada pendapat dari tim ahli yang harus sangat diperhitungkan. Nadanya bahkan mengatakan pendapat itu harus dituruti 100 persen.

Entah mengapa, akhirnya yang terbentuk bukanlah tim yang seluruhnya ahli-ahli luar negeri, melainkan dua orang asing dan dua orang Indonesia. Setelah pendapat dari tim ahli itu selesai, maka pekerjaan amandemen dapat dilanjutkan lagi.

Mengapa ada kebutuhan *mengamandemen* UU BI Nomor 23 Tahun 1999? Karena diprovokasi oleh pemerintah. Jadi, dengan UU BI yang sudah sangat independen itu, ternyata *toh* bisa dibuat berantakan oleh jurus-jurus pemerintah, sehingga dirasa perlu untuk diamandemen.

Jelas sekali sifat relatifnya kata "independen" itu. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang mempunyai kebutuhan mengamandemen UU BI. Walaupun *independensi* yang ada di dalam UU BI tersebut terlampau ekstrem, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya.

Bagaimana kejadiannya?

Presiden Abdurrahman Wahid ingin Prijadi Praptosuhardjo menjadi Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ternyata tidak mungkin, karena menurut aturan yang berlaku, Prijadi tidak lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh BI.

Presiden marah, dan Gubernur BI Sjahril Sabirin diminta melakukan *fit and proper test* ulang yang secara tersirat harus meluluskan Prijadi, atau mengundurkan diri, atau dikriminalkan atas dasar indikasi-indikasi keterlibatannya dalam skandal Bank Bali.

Sjahril Sabirin menolak, dan akhirnya memang dikriminalkan sampai ditahan. Setelah itu, pada tanggal 17 November 2000, BI didatangi oleh Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, dan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Semua anggota dewan gubernur yang kebetulan ada di kantor dikumpulkan, dan oleh Jaksa Agung diancam bahwa sebagian dari mereka harus mengundurkan diri atau dikriminalkan, karena Jaksa Agung mempunyai indikasi-indikasi keterlibatan mereka dalam berbagai penyelewengan.

Setelah berunding, sebagian anggota Dewan Gubernur BI yang hadir memilih mengundurkan diri. Guna mengisi Dewan Gubernur BI supaya lengkap, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengamandemen UU BI dengan maksud tunggal, yaitu agar dengan UU BI yang sudah diamandemen memungkinkan mengganti dewan gubernur seluruhnya dengan yang baru sama sekali. Maka pada tanggal 19 November 2000, Ketua DPR Akbar Tandjung didatangi oleh Menko Perekonomian dan Jaksa Agung supaya DPR memberikan kerja samanya mengamandemen UU BI dalam waktu satu minggu. Seperti kita ketahui, nyatanya proses amandemen berlarut-larut sampai hari ini, atau sudah berjalan enam bulan.

Yang tampaknya lepas dari perhatian para pengamat dan IMF adalah bahwa UU BI yang sangat independen ternyata bisa dengan mudah diporak-porandakan oleh jurus tertentu dari pemerintah.

Lantas apa artinya independensi itu?

Toh para pengamat, IMF, dan para ahli gabungan masih saja fanatik, dogmatis, doktriner dan bahkan obsesif mempertahankan independensi BI, tanpa dijelaskan apa yang diartikan dengan kata "independen" itu, dan mengapa kalau BI dibuat independen seperti yang mereka pahami, semua tujuan BI akan tercapai?

Dua hal sangat menonjol tidak lagi dibicarakan oleh mereka. Pertama adalah yang sudah diuraikan tadi, yaitu bahwa BI yang menurut UU BI yang berlaku sudah sangat independen ternyata bisa diporak-porandakan. Kedua adalah bahwa BI yang masih bekerja dengan independensi penuh atas landasan UU BI Nomor 23 Tahun 1999 ternyata sama sekali tidak dapat menenuhi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mempertahankan stabilitas nilai rupiah.

◆◆◆

MENGAPA masih saja begitu dogmatis tentang independensi BI yang harus begitu mutlak kecuali tuntutan pertanggungan jawab?

Maka, marilah kita tengok pendapat dari seorang ang[gota] Dewan Gubernur Bank Se[ntral] AS (the Federal Reserve S[ystem] (FED)). Dia adalah Laur[ence] H Meyer yang memberikan [ceramah di University of Wisc[onsin], LaCrosse, pada 24 Okt[ober] 2000.

Ceramah ini cukup lengkap membahas masalah independensi bank sentral. Judulnya *The politics of monetary policy - balancing independence and accountability*. Ceramahnya cukup panjang, setebal 15 halaman dan berkualitas, karena kecuali bahwa dia pelaku, dia juga menggunakan 22 buku dan tulisan sebagai referensinya.

Hari / Tanggal / Bulan / Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Sebenarnya, semua yang dikatakannya sangat menarik dan relevan untuk pembahasan yang sedang kita lakukan. Di AS sendiri pengertian independensi bank sentral penuh dengan dilema, dualisme, dan relativitas. Marilah kita telusuri beberapa petikannya sebagai berikut.

Meyer mulai dengan menggunakan definisi dari kata *independence* yang tercantum dalam kamus-kamus. Di sana dikatakan, *being free from the influence, guidance, or control of another or others.*

Dia lalu mengatakan, *as applied to central banks, that translates into being free from the influence, guidance or control of the rest of government, meaning both the executive and legislative branches in the United States.*

Jelas sekali dari kalimat-kalimat ini bahwa kalau eksekutif dan legislatif tidak boleh ikut campur tangan sama sekali. Lantas siapa yang membuat undang-undangnya, dan siapa pula yang untuk kepentingan orang banyak harus mengawasinya?

Meyer berhenti sampai di sini. Namun, dapat kita simpulkan sendiri bahwa kalau legislatif dan yudikatif tidak boleh ikut terlibat, boleh dikatakan bahwa bank sentral hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.

Dikatakan bahwa diyakini oleh kalangan luas bahwa independensi adalah prasyarat untuk pencapaian tujuan yang ditugaskan kepada bank sentral, terutama stabilitas harga.

Dalam paragraf yang sama segera saja dikatakan, independensi tidak berarti secara harafiah independen dari pemerintah, karena bank sentral di sini dan di luar negeri selalu adalah bagian dari pemerintahan. Maka hubungan antara bank sentral dan bagian-bagian lainnya dari pemerintah dalam praktiknya lebih kompleks dari kesan yang ditimbulkan dari kata "independen".

Dikatakan bahwa motivasi dari pemberian independensi kepada bank sentral adalah agar dalam menjalankan kebijakan moneternya bank sentral dilindungi dari intervensi politik, terutama bilamana mendekati pemilihan umum, di mana partai-partai politik biasanya mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk meraih kepentingan jangka pendeknya.

Dalam paragraf yang sama segera saja dikatakan bahwa "Intensi pemberian perlindungan ini tidak memberikan kebebasan kepada bank sentral untuk melakukan kebijakan apa pun yang disukainya sendiri, tetapi dimaksud untuk memberikan komitmen yang kredibel oleh pemerintah kepada bank sentral dalam mencapai tujuannya, terutama stabilitas harga."

Apa artinya ini? Harap perhatikan sungguh-sungguh bahwa titik tolaknya adalah pemberian komitmen yang kredibel dari pemerintah kepada bank sentral. Ini ucapan anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS, yang oleh para penganutnya di Indonesia disalahpahami secara 'keblinger' bahwa independensi seolah-olah adalah mutlak.

Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama, Laurence Meyer mengatakan bahwa independensi yang terbatas pun, kalau ditafsirkan secara harfiah dapat dilihat sebagai tidak konsisten dengan idealisme demokrasi. Maka independensi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban.

Meyer juga mengatakan dengan jelas bahwa prioritas APBN dapat bertentangan dengan prioritas kebijakan moneter. Pemerintah biasanya menghendaki tingkat suku bunga yang rendah, supaya jumlah bunga yang harus dibayar untuk utangnya rendah.

Bank sentral menginginkan tingkat suku bunga yang berubah-ubah, karena tingkat suku bunga adalah instrumen penting bagi bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneternya. Ketegangan ini terjadi dalam dua kali perang dunia dan bertahun-tahun setelah itu.

Meyer juga menggambarkan terjadinya berkali-kali ketidakkonsistenan waktu dalam menjalankan kebijakan moneter. Untuk mengatasinya, ditempuh berbagai jalan, antara lain yang berlaku di Selandia Baru, yaitu gubernur bank sentralnya harus menandatangani kontrak, bahwa dirinya dapat dipecat kalau inflasi melampaui tingkat tertentu.

Rasanya jelas bahwa penyelesaian semacam ini cukup kohyol dan picik. Seperti dikatakan Meyer juga, instrumen bank sentral yang independen bisa bertentangan dengan instrumen pemerintah yang juga independen.

Kalau gubernur bank sentral Selandia Baru gagal karena kekuatan instrumen pemerintah—yang bertentangan dengan instrumennya—lebih kuat, dia dipecat. Dia yang bernama Donald T Brush bersama-sama dengan mantan Gubernur Bank Sentral Cile Roberto Zahre adalah dua ahli asing yang disodorkan oleh IMF.

Sebenarnya masih sangat banyak hal menarik yang dapat dipetik dari ceramah Laurence Meyer tersebut. Intinya adalah bahwa Laurence Meyer sebagai anggota Dewan Gubernur Fed AS menggambarkan betapa kata independen itu ternyata sangat relatif, baik dalam konsep maupun dalam pelaksanaan.

Menjadi jelas bahwa dalam praktik tidak ada independensi yang mutlak bagi bank sentral

[redacted]mana pun juga. Hal ini disebabkan karena kebijakan moneter dan keuangan adalah bagian dari kebijakan sosial dan ekonomi. Banyak aspek serta instrumen untuk menjalankan kebijakan yang lebih besar tersebut tidak dimiliki, dan tidak mungkin dijadikan monopoli bank sentral.

Maka, dalam pidato pemandangan umum yang diucapkan oleh PDI Perjuangan tentang RUU Amandemen UU BI Nomor 23 Tahun 1999 pada 29 November 2000, antara lain dikemukakan keterkaitan antara instrumen BI dengan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ketika itu PDI Perjuangan menyebutkan dua contoh, yaitu hubungan yang ditemukan oleh Irving Fisher, bahwa MV=PT.

Jelas bahwa P yang berarti *price* atau harga—dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain tetap)—ditentukan oleh tiga faktor menurut persamaan Irving Fisher ini, yaitu V atau *velocity of money* (kecepatan peredaran uang), T atau *volume of trade* (volume perdagangan) dan M atau *amount of money* (jumlah uang).

Dari tiga faktor ini, yang merupakan wilayah bank sentral yang independen hanya satu, yaitu M. Lantas apa artinya independensi? Maka sangat lucu kalau target stabilitas mata uang Selandia Baru tidak dicapai, Donald Brush yang penasihat internasional kita, bisa dipecat.

Tentang konsep NAIRU yang berarti Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, menggambarkan adanya *trade off* (pertentangan) antara inflasi dan *employment*.

Semakin pemerintah ingin memperkecil pengangguran, semakin besar tekanan terhadap inflasi. Penanggulangan pengangguran adalah wilayahnya pemerintah dengan berbagai macam instrumen, sedangkan pengendalian inflasi adalah wilayah bank sentral yang mempunyai instrumen-instrumennya sendiri. Itulah sebabnya bahwa di AS, antara akhir Perang Dunia II sampai pertengahan tahun 1970-an, mandat untuk kebijakan moneter didasarkan atas Employment Act of 1946.

Betapapun bank sentral independen dalam memilih instrumen-instrumen yang dimilikinya, selalu bisa dikalahkan oleh kekuatan dari instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Lagi-lagi menjadi pertanyaan, apa kegunaan independensi bank sentral yang begitu fanatik dipahami sampai menjadi dogma atau doktrin.

BUKANKAH tujuan apa pun yang ditugaskan kepada BI un-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

tuk dicapai dan dipertahankan, selalu adalah bagian dari keseluruhan kebijakan sosial dan ekonomi? Maka di Belanda, undang-undang bank sentralnya terang-terangan menempatkan gubernur bank sentralnya (yang di sana namanya Presiden Bank Sentral) di bawah Menteri Keuangan.

Memperhatikan notulen dan kesimpulan dari perdebatan tentang lahirnya UU Bank Sentral Belanda, dalam apa yang dinamakan *parlementaire behandeling*, dan disisipkan ke dalam undang-undang sebagai penjelasan dasar, dikatakan sebagai berikut.

"Kebijakan moneter dan keuangan tidak dapat ditentukan secara otonom, mereka harus merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Penentuan arah dari kebijakan moneter adalah tanggung jawab pemerintah."

Mengingat bahwa arah dari kebijakan moneter ditentukan oleh pemerintah, Menteri Keuangan harus mempunyai kewenangan memberikan arahan yang mengikat kepada Direksi Nederlandse Bank tentang hal-hal *prinsipieel* yang dapat bertentangan dengan kebijakan keuangan pemerintah.

Sebagai akibat dari prinsip tersebut, struktur organisasi dari Bank Sentral Belanda adalah bahwa direksi diawasi oleh banyak dewan, yaitu dewan komisaris, komisaris ratu, dan dewan bank sentral yang terdiri dari 17 anggota; satu komisaris ratu, dua dari dewan komisaris, dan 17 dari dewan bank sentral yang mengandung perwakilan-perwakilan dari perdagangan (termasuk transportasi), industri, pertanian, buruh, dan para ahli dalam bidang keuangan dan perbankan.

Saya hendak mengatakan bahwa independensi bukan barang yang mutlak. Bentuk ekstrem lainnya yang diametral terdapat di Belanda, sebuah negara kecil yang mungkin tidak berarti, tetapi jelas mempunyai mata uang yang sangat kokoh stabilitasnya.

Apakah sebuah bank sentral harus independen atau tidak, serta apa yang diartikan dengan independen serta sampai derajat seberapa besar, sangat terkait pada budaya, tata nilai dari bangsa yang bersangkutan, serta pengalaman dan masalah emprik yang hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu saja. Tidak ada mutlak-mutlakan.

Last but not least, relativitas dari kata "independen" yang sangat diributkan dan dikumandangkan secara absolut, dogmatis dan doktriner oleh para pengamat ekonomi itu, di Indonesia sendiri tergambarkan dalam dua peristiwa.

Dengan UU BI yang lama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 1968, BI dihancurleburkan oleh Presiden Soeharto. Dengan UU BI yang katanya sudah sangat independen—sebagai bandul ekstrem untuk mengoreksi UU Nomor 13 Tahun 1968—yaitu UU BI Nomor 23 Tahun 1999, manajemen BI juga dihancurleburkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengkriminilkan Gubernur BI dan *blackmailing* terhadap beberapa anggota Dewan Gubernur BI pada tanggal 17 November 2000.

Itulah sebabnya Laurence Meyer antara lain mengatakan bahwa *an intangible contributor to independence, but arguably the most important, is the appointment of a capable, respected, politically astute, and "independent minded" chairman* (faktor tak terlihat untuk menunjang independensi bank sentral, tetapi yang jelas terpenting perannya adalah gubernurnya harus kapabel, dihormati, cerdik dalam interaksi perpolitikan, dan mempunyai mental serta karakter yang independen).

Jadi, dibolak-balik seperti apa pun, yang terpenting adalah siapa manusianya, dan bukan apa yang tertulis di atas lembaran-lembaran kertas yang bernama undang-undang, walaupun harus segera saya katakan bahwa undang-undang yang baik tidak dapat dihindarkan.

(Kwik Kian Gie/*mantan Menko Ekuin, anggota DPR*)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 15 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 14 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek (NO. KLASS) : UANG / 332.4

Rupiah Terus Melemah, Pengaruhi Restrukturisasi

Jakarta, Kompas

Rupiah di pasar *spot* antarbank Jakarta, Senin (14/5), ditutup melemah 145 poin ke posisi Rp 11.400/ Rp 11.450 per dollar AS. Pada akhir pekan lalu, rupiah berada pada posisi Rp 11.255/Rp 11.300.

Semakin lemahnya nilai tukar rupiah, menurut Bacelius Ruru, Ketua Prakarsa Jakarta, lembaga yang bertugas memfasilitasi restrukturisasi utang perusahaan Indonesia, menyatakan akan sangat berpengaruh negatif terhadap jalannya restrukturisasi korporasi yang berada dalam mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. Namun demikian, hingga kini belum ada perusahaan swasta yang mengirimkan permohonan registrasi ulang restrukturisasinya.

"Saya belum mendengar adanya perubahan rencana bisnis mereka," ujar Ruru usai serah terima jabatan komisaris Bursa Efek Jakarta (BEJ) di Jakarta, Senin. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham BEJ pekan lalu, Ruru terpilih sebagai Komisaris Utama BEJ.

Hingga 31 April, jumlah restrukturisasi yang telah diselesaikan Prakarsa Jakarta sebesar 11,8 milyar dollar AS. Menurut *letter of intent* (LoI) terakhir, Prakarsa Jakarta harus dapat merestrukturisasi utang korporasi sebesar 12 milyar dollar AS. Target restrukturisasi selanjutnya belum diberikan, karena LoI yang seharusnya ditandatangani Desember 2000 lalu hingga kini belum juga ditandatangani sehingga Prakarsa Jakarta belum mendapatkan target restrukturisasi berikutnya.

Menurut dia, jalannya restrukturisasi korporasi juga harus mempertimbangkan nilai tukar rupiah, keadaan mikro ekonomi, dan instabilitas politik. Menurut Ruru, restrukturisasi akan berjalan lancar jika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada kisaran yang sama dengan asumsi revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 9.600 per dollar AS.

Pada perdagangan awal pekan ini, rupiah langsung melemah dan berada pada level Rp 11.280 per dollar AS. Rupiah terus melemah sehingga mencapai posisi Rp 11.415 per dollar AS.

Di samping adanya tekanan kekhawatiran terhadap perkembangan politik dalam negeri, intervensi Bank Indonesia juga tidak berarti.

Sementara itu, di pasar saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEJ melemah 2,077 poin menjadi 368,282, sedangkan Indeks LQ-45 yang memuat 45 saham terlikuid turun 0,625 menjadi 73,659. Volume perdagangan sebanyak 357,9 juta lembar saham senilai Rp 174,079 milyar. Volume ini hanya separuh dari volume yang dicapai Jumat pekan lalu. Investor selain khawatir akan situasi politik, juga semakin melemahnya nilai tukar rupiah. Padahal, bursa regional cenderung meningkat.

Tindakan politik

Sementara itu, Hindarmojo Hinuri, Direktur II Bursa Efek Surabaya (BES), meminta agar pemerintah tidak melakukan tindakan politik yang akan menambah hancur kondisi ekonomi yang sudah compang-camping ini.

"Melihat kondisi sekarang, masyarakat dunia usaha sudah kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Kalau ada tindakan politik yang semacam itu, ekonomi kita akan benar-benar sulit diperbaiki. Butuh waktu panjang, sementara kerugian bisnis terjadi terus. Lalu sampai kapan dunia usaha harus bertahan," katanya di Surabaya.

Menurut Mojo, parahnya kondisi ekonomi Indonesia juga telah membuat dua bursa yang ada di Indonesia sempoyongan. Bahkan sebenarnya kedua bursa itu sudah hilang dari pasar modal dunia. Selama tahun 2000, nilai transaksi rata-rata harian di BES hanya sekitar Rp 41 milyar, sedangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar Rp 515 milyar. Tahun 2001, di BES rata-rata harian nilai transaksi sebesar Rp 9 milyar, sedangkan di BEJ mencapai Rp 369 milyar.

(joe/arn)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 16 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / I-S
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : UANG | 332.4

BI: Risiko Politik Menjadi Risiko Keuangan

Jakarta, Kompas

Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menilai, dominasi aksi beli mata uang dollar AS masih dipicu persepsi pasar terhadap risiko politik yang kemudian berkembang menjadi risiko keuangan (*financial risk*). Itu dipresentasikan oleh memburuknya ekspektasi depresiasi seperti terlihat pada peningkatan premi *swap* yang pada bulan April 2001 meningkat jadi 13,2 persen, jauh lebih tinggi dibanding premi bulan Desember 2000 sebesar 7,2 persen.

Analisa tersebut merupakan salah satu poin dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (15/5), di Jakarta.

Di pasar uang *spot* antarbank Jakarta, nilai tukar rupiah kembali melemah 50 poin, ditutup pada kurs Rp 11.450/Rp 11.470 per dollar AS. BI mencatat titik terendah rupiah selama April lalu berada pada posisi Rp 11.200 yang merupakan titik terendah sejak Agustus 1998. Secara rata-rata bulanan, rupiah mencapai Rp 11.116, atau melemah 8,98 persen dibanding bulan sebelumnya.

Menurut Dewan Gubernur BI, perkembangan nilai tukar rupiah beberapa bulan ke depan masih sangat rentan terhadap sentimen negatif yang dipengaruhi ketidakstabilan situasi politik yang dapat berkembang menjadi *financial risk*.

Dewan Gubernur BI juga memandang tekanan inflasi di bulan-bulan mendatang diperkirakan masih akan tinggi. Beberapa faktor yang akan memberikan tekanan pada inflasi terutama akan berasal dari kebijakan pemerintah di bidang harga atau pendapatan, tingginya ekspektasi inflasi, dan dampak melemahnya nilai tukar rupiah.

Sehubungan dengan situasi itu, Dewan Gubernur BI menyatakan, penerapan kebijakan moneter yang hati-hati amat kritikal dalam menjaga stabilitas moneter dan ekonomi secara keseluruhan. BI akan tetap menempuh strategi kebijakan yang hati-hati secara konsisten dan disiplin untuk mencapai sasaran pertumbuhan uang primer. Pencapaian uang primer secara disiplin dipandang sebagai upaya minimum yang harus dilakukan dengan fokus penggunaan instrumen operasi pasar terbuka.

Memburuk

Di samping itu, untuk mencegah kenaikan suku bunga yang berlebihan, sterilisasi rupiah di pasar valuta asing tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara hati-hati dan terukur. Apabila hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan memperburuk kondisi yang saat ini masih diliputi ketidakpastian.

Secara umum, laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) bulan April tercatat sebesar 0,46 persen sehingga secara kumulatif tahun kalender mencapai 2,57 persen. Sumbangan komponen kebijakan pemerintah terhadap laju inflasi bulan April diperkirakan sebesar 0,21 persen yang bersumber dari kenaikan harga jual eceran rokok, tarif perusahaan air minum, dan kenaikan harga bahan bakar minyak untuk sektor industri dan kapal. Selain itu, nilai tukar yang terus melemah secara langsung diikuti kenaikan harga barang-barang yang diperdagangkan secara internasional (*tradable*) yang selanjutnya mendorong pula kenaikan kelompok barang *non-tradable*. **(*/dis/joe)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 28 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : IS / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SANTOSO, WISOYO
Subjek / NO. KLASS : INVESTASI / 332.7

Mengapa Suku Bunga Cenderung Naik?

KEBIJAKAN moneter yang saat ini ditempuh Bank Indonesia pada dasarnya cenderung ketat (*tight biased*). Artinya, pengendalian pertumbuhan jumlah uang beredar (*base money*) tahun 2001 diupayakan mencapai 11-12 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan angka aktual pertumbuhan rata-rata tahun 2000 sebesar 18,8 persen (rata-rata harian *base money* tahun 2000 dibandingkan rata-rata tahun 1999).

SALAH satu konsekuensi penetapan target *base money* tahun ini, yang jauh lebih rendah dibandingkan angka aktual tahun sebelumnya, adalah kenaikan suku bunga, khususnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Akibatnya, berbagai pendapat dilontarkan masyarakat dalam menyikapi fenomena ini.

Sorotan tentang dampaknya terhadap APBN, kelangsungan intermediasi perbankan, hingga pemulihan sektor riil, digulirkan. Maka, cukup relevan jika dipaparkan pula dasar atau pola pikir yang melatarbelakangi naiknya suku bunga SBI tersebut.

Mengingat perekonomian Indonesia masih dalam tahap proses pemulihan, sesungguhnya arah kebijakan moneter yang dipilih hanya bersifat cenderung ketat. Bukan sangat ketat seperti yang terjadi pada tahun 1998, pada saat suku bunga SBI mencapai 70,4 persen pada bulan Agustus.

Kebijakan moneter yang cenderung ketat tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan *trade off* atau meminimalisasi kerugian antara kepentingan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepentingan laju inflasi yang rendah.

Kebijakan moneter yang sangat ketat akan cenderung menekan laju inflasi dari sisi permintaan dan menekan laju pertumbuhan ekonomi riil. Sebaliknya, kebijakan moneter yang sangat longgar akan meningkatkan laju inflasi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi riil.

Kebijakan moneter yang cenderung ketat sudah memperhitungkan *trade off* tersebut dan diharapkan dapat memberikan sinyal kepada publik dan pasar bahwa kebijakan moneter tidak cenderung mengakomodir laju inflasi yang tinggi (tidak terlalu longgar). Namun, juga tidak cenderung mengorbankan pertumbuhan ekonomi (tidak terlalu ketat).

Dengan demikian, bank sentral pada prinsipnya sangat berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan moneternya demi kepentingan semua pihak. Kehati-hatian ini dicerminkan oleh relatif kecilnya kenaikan suku bunga SBI dan strategi kenaikannya yang bertahap, bukan drastis.

Dalam tahun 2000, suku bunga SBI satu bulan mulai meningkat sejak bulan Mei, dari 10,88 persen menjadi 14,53 persen pada bulan Desember 2000, atau meningkat sebesar 3,65 persen poin. Sampai dengan 16 Mei 2001, suku bunga SBI satu bulan cenderung meningkat menjadi 16,31 persen atau bertambah 1,78 persen poin.

Dalam tahun 2001 (sampai Mei), akselerasi kenaikan suku bunga SBI meningkat rata-rata sebesar sembilan basis poin per setiap kali lelang (mingguan), sedikit meningkat dibandingkan tujuh basis poin pada tahun 2000.

Tekanan inflasi

Sedikitnya terdapat tiga alasan mengapa suku bunga SBI cenderung meningkat. Pertama, karena tingginya tekanan inflasi. Inflasi dapat menggerogoti pendapatan riil masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap, sehingga laju inflasi harus ditekan serendah-rendahnya.

Bagi yang tidak berpendapatan tetap pun, laju inflasi masih dapat menurunkan pendapatan riil apabila laju inflasi lebih cepat dibandingkan laju kenaikan pendapatan nominal. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang relatif rendah merupakan prakondisi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang BI Nomor 23 Tahun 1999, sasaran akhir kebijakan moneter adalah inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter hanya dapat mengendalikan inflasi dari sisi permintaan dalam negeri, khususnya konsumsi swasta dan investasi swasta. Sedangkan konsumsi dan investasi pemerintah pada umumnya bersifat otonom karena tidak terkait dengan suku bunga.

Kenaikan suku bunga dimaksudkan untuk mengurangi minat konsumen/produsen untuk memperoleh kredit konsumsi dan meningkatkan investasi. Laju inflasi yang bersumber dari kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah dan bencana alam (musim kemarau, banjir, serangan hama) adalah di luar kemampuan kebijakan moneter.

Maka, kebijakan moneter pada dasarnya hanya dapat mempengaruhi laju inflasi dari sisi permintaan, atau sering disebut

sebagai inflasi inti (*core inflation*). Namun, dalam masa pemulihan ekonomi seperti sekarang ini, konsumsi dan investasi relatif masih lemah sehingga dampaknya terhadap inflasi inti diperkirakan juga relatif kecil.

Dalam tahun 2000, konsumsi swasta tumbuh sekitar 3,9 persen, jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (1994-1996) yang sebesar 9,8 persen. Sedangkan investasi tahun 2000 tumbuh sekitar 17,9 persen, cukup tinggi karena dasar investasi tahun 1999 yang sangat rendah.

Mengingat laju inflasi yang bersumber dari permintaan dalam negeri relatif lemah, kenaikan suku bunga secara hati-hati dan bertahap tersebut diharapkan tidak menghambat pertumbuhan konsumsi dan investasi secara berarti.

Laju inflasi tahun 2000 sebesar 9,3 persen bersumber dari kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah sekitar 3,2 persen, melemahnya nilai tukar rupiah sekitar 3,3 persen (setiap satu persen depresiasi rupiah per dollar diperkirakan akan meningkatkan laju inflasi 0,14 persen), dan meningkatnya kegiatan ekonomi (2,8 persen).

Dari komposisi sumber inflasi ini dapat terlihat bahwa dampak kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah dan dampak depresiasi nilai tukar rupiah memiliki sumbangan terbesar terhadap laju inflasi, karena keduanya dapat mendorong adanya ekspektasi inflasi.

Namun, karena masih lemahnya permintaan domestik, seperti dicerminkan oleh masih relatif kecilnya sumbangan inflasi dari kegiatan ekonomi, maka kebijakan moneter diarahkan cenderung ketat (tidak perlu sangat ketat). Ini antara lain untuk menekan laju ekspektasi inflasi akibat kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah dan depresiasi nilai tukar rupiah, serta untuk meminimalisasi kerugian *output*, yakni pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga dan beberapa negara mitra dagang, tekanan inflasi di Indonesia memang cukup tinggi. Sampai Maret 2001, laju inflasi *year on year* Indonesia adalah 10,6 persen. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan Filipina (6,69 persen), Malaysia (1,5 persen), Korsel (4,4 persen), Thailand (1,39 persen), Taiwan (0,44 persen), Cina (1,3 persen), India (5,5 persen), dan Singapura (1,79 persen).

Suku bunga riil

Alasan kedua naiknya suku bunga adalah untuk mempertahankan suku bunga riil yang wajar, namun tetap menarik, baik bagi deposan dalam negeri maupun bagi investor luar negeri.

Di dalam negeri, mempertahankan suku bunga riil yang wajar diharapkan dapat menarik bagi sektor surplus (deposan) untuk menanamkan dananya di perbankan dalam negeri, agar tersedia dana yang cukup untuk kegiatan investasi dan konsumsi dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi.

Mempertahankan suku bunga riil yang wajar dan menarik dibandingkan beberapa negara mitra dagang, minimal juga dapat menghambat atau mencegah pelarian modal ke luar negeri, kalau tidak bisa dikatakan mendorong arus modal masuk.

Kebijakan moneter yang cenderung ketat tahun 2000 menghasilkan suku bunga riil SBI satu bulan rata-rata sebesar 9,3 persen, lebih tinggi dibandingkan suku bunga SBI dalam tahun 2001 (Januari-April) yang rata-rata sebesar 6,6 persen. Kebijakan moneter cenderung ketat, yang menghasilkan suku bunga SBI riil sekitar 5-7 persen, dapat dipandang relatif wajar dan menarik bagi deposan dalam negeri.

Namun demikian, kenaikan suku bunga secara bertahap dan hati-hati ternyata kurang direspons secara proporsional oleh kenaikan suku bunga deposito, sehingga rata-rata suku bunga riil SBI lebih besar dibandingkan rata-rata suku bunga riil deposito. Hal ini karena perbankan masih belum bergairah menyalurkan kredit dan masih menginginkan menanamkan dananya di BI dalam bentuk SBI.

Suku bunga riil deposito satu bulan dalam tahun 2000 rata-rata sebesar 6,9 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 (Januari-April) yang rata-rata sebesar 2,9 persen. Suku bunga riil deposito Indonesia tahun 2000 tersebut relatif masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara mitra dagang seperti AS, Jepang, Singapura, Cina, Korsel, Malaysia, Jerman, dan India yang memiliki suku bunga riil sekitar 0,5-2,0 persen. Negara mitra dagang yang suku bunga deposito riilnya lebih tinggi dari Indonesia adalah Hongkong, Taiwan, AS, dan India.

Bagi investor luar negeri yang ingin melakukan investasi di Indonesia, tidaklah cukup hanya melihat suku bunga riil dalam negeri. Faktor ekspektasi depresiasi harus diperhitungkan oleh investor luar negeri yang ingin menanamkan dananya di Indonesia, misalnya dalam bentuk investasi portofolio.

Investor luar negeri biasanya akan menggunakan *covered real interest rate*, yakni suku bunga riil dalam negeri dikurangi dengan ekspektasi depresiasi (*premi swap*). *Premi swap* jangka waktu satu bulan dalam tahun 2000 rata-rata sebesar enam persen, sehingga *covered real deposit rate* satu bulan Indonesia dalam tahun tersebut hanya tinggal positif sekitar 0,9 persen.

Dalam tahun 2001 (Januari-April), *premi swap* satu bulan meningkat tajam menjadi rata-rata 11,4 persen sehingga *covered real deposit rate* satu bulan sudah negatif cukup besar, yakni rata-rata 8,5 persen. Dengan demikian, untuk menarik investor luar negeri maka suku bunga harus jauh lebih tinggi lagi.

Hal ini tidak dilakukan oleh BI karena berbagai kendala yang dihadapi oleh kebijakan moneter, baik menyangkut kondisi perbankan, sektor riil yang masih belum pulih, maupun kondidi fiskal yang rapuh (*fragile*). Oleh karenanya, kenaikan suku bunga secara bertahap dan hati-hati sekarang ini tampaknya menjadi pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada.

Tekanan nilai tukar

Cenderung melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang Indonesia juga melatarbelakangi naiknya suku bunga. Kenaikan suku bunga memang tidak secara langsung diarahkan untuk mencapai nilai tukar rupiah pada target tertentu.

Hal ini terkait dengan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang bebas sejak Agustus 1997, di mana dalam sistem tersebut BI tidak memiliki kewajiban resmi untuk mempertahankan nilai tukar rupiah pada tingkat tertentu, karena nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, BI dapat melakukan intervensi di pasar valas dalam rangka *smoothening* (mencegah agar nilai tukar tidak berfluktuasi secara tajam).

Negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang bebas umumnya lebih memfokuskan pada pengendalian harga-harga dalam negeri, dengan membiarkan nilai tukar melakukan penyesuaian sendiri. Peranan bank sentral dalam mengendalikan nilai tukar dilakukan secara tidak langsung melalui pengendalian jumlah uang beredar atau perubahan suku bunga.

Secara teori, kenaikan suku bunga akan mendorong aliran modal masuk yang selanjutnya dapat mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Namun, dalam kondisi sosial-politik-kemanan dan hukum yang belum kondusif, kenaikan suku bunga menjadi tidak sensitif terhadap aliran modal masuk, sehingga penggunaan instrumen suku bunga untuk memperkuat nilai tukar menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, kenaikan suku bunga secara drastis tidak diperlukan. Kenaikan suku bunga secara gradual dan hati-hati minimal dimaksudkan untuk menghambat ekspektasi depresiasi akibat kondisi sosial-politik-kemanan dan hukum yang belum kondusif.

Namun demikian, walaupun hubungan antara suku bunga

dan nilai tukar tidak signifikan, kombinasi antara depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 24,1 persen dalam tahun 2000 (*year on year*), serta menguatnya perekonomian negara-negara mitra dagang (AS, Singapura, Cina, Korsel, Taiwan, Malaysia, Hongkong, dan India) telah meningkatkan ekspor barang dan jasa dalam tahun 2000 sebesar 16,1 persen.

Situasi sosial-politik-keamanan dan hukum yang belum kondusif biasanya juga dapat dicerminkan oleh meningkatnya premi risiko Indonesia. Premi risiko ini biasanya dihitung dari selisih suku bunga *treasury bill* AS dan suku bunga obligasi Indonesia di AS (*Yankee bond*).

Meningkatnya premi risiko Indonesia dicerminkan oleh semakin rendahnya suku bunga obligasi Indonesia di AS, sehingga selisihnya dengan suku bunga *treasury bill* AS semakin tinggi. Selama dua tahun terakhir, premi risiko Indonesia mencapai titik terendah pada bulan Maret 2000 sebesar 452 basis poin. Selanjutnya, terus meningkat menjadi menjadi 786 basis poin pada April 2001, atau meningkat sebesar 334 basis poin.

kebijakan moneter yang cenderung ketat diarahkan untuk menekan ekspektasi inflasi yang ditimbulkan oleh kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah, serta ekspektasi depresiasi nilai tukar rupiah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi maupun non-ekonomi.

Kenaikan suku bunga secara bertahap dan hati-hati diharapkan tidak menghambat secara berarti kegiatan ekonomi dalam negeri dalam tahun 2001, baik berupa kegiatan konsumsi maupun investasi.

Masih kompetitifnya nilai tukar rupiah (*real effective exchange rate*) diharapkan masih dapat mendorong ekspor Indonesia tahun ini, walaupun terjadi penurunan *trade weighted* pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia dari 5,5 persen pada tahun 2000 menjadi 3,8 persen pada tahun 2001. **(Wijoyo Santoso, *Kepala Bagian Studi Ekonomi Makro Bank Indonesia*)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 22 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek (NO. KLASS) : OBLIGASI / 332.6

Rencana Sekuritisasi Aset Ditunda

Jakarta, Kompas

Pemerintah akhirnya menunda rencana sekuritisasi atau penerbitan obligasi senilai 500 juta dollar AS hingga satu milyar dollar AS yang dijamin dengan penerimaan dari ekspor gas alam cair (*liquefied natural gas*/LNG) dari Natuna Barat ke Singapura. Penundaan tersebut, selain karena desakan sejumlah negara donor seperti Jepang dan beberapa negara lain, juga karena masih adanya masalah hukum yang belum dapat diselesaikan dalam rencana tersebut.

"Masalahnya belum *clear*, karena itu ditunda dulu," demikian Menteri Keuangan dan Pemberdayaan BUMN Prijadi Praptosuhardjo menjawab pers sebelum mengikuti rapat konsultasi menyangkut rencana revisi APBN 2001 dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta, Senin (21/5).

Kepala Perwakilan IMF di Jakarta John Dodsworth hari Senin kemarin menyatakan, menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda rencana sekuritisasi aset ini. Dengan ditundanya rencana ini, maka kini tinggal satu syarat lagi yang belum dipenuhi Indonesia untuk bisa dikirimkannya misi IMF dan dicairkannya pinjaman IMF senilai 400 juta dollar yang sejak Desember 2000 tertunda.

Syarat tersebut adalah menyangkut amandemen Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI). Dodsworth menegaskan, IMF tidak akan melanjutkan pinjaman untuk Indonesia, sebelum Indonesia mengamandemen UU BI sesuai rekomendasi tim panel. Dalam amandemen UU BI ini, Dodsworth menilai pemerintah telah mengabaikan sebagian besar rekomendasi tim panel.

Menurut Prijadi, permintaan penundaan rencana sekuritisasi antara lain dilontarkan Jepang dan sejumlah negara donor lain pada pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Honolulu, Hawaii, AS, belum lama ini. Sedangkan IMF, sebenarnya tidak secara eksplisit meminta rencana tersebut dibatalkan. Prijadi sendiri mengaku belum tahu sampai kapan penundaan dilakukan. "Itu masih akan dikaji lagi," ujarnya.

Ditanya, apakah penundaan sekuritisasi aset akan mengurangi penerimaan APBN 2001, Prijadi mengatakan, sekuritisasi aset belum masuk dalam APBN 2001. "Di dalam APBN itu tidak muncul," katanya.

Sementara, Staf Ahli Menkeu Anggito Abimanyu mengatakan, sekuritisasi aset ini sebetulnya masih dalam rencana. "Pemerintah tidak akan mengajukan proposal sekuritisasi jika bertentangan dengan konvensi internasional dan *concern* negara-negara donor tersebut. Memang, itu ditanyakan oleh Jepang dan IMF, apakah pemerintah akan terus jalan dengan proposal sekuritisasi itu. Jadi, itu baru *statement* Menko Perekonomian," katanya.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro tidak secara eksplisit menyebutkan akan ada penundaan sekuritisasi aset. Dikatakan, pembahasan pemerintah sekarang masih pada revisi APBN 2001 dan belum sampai ke masalah sekuritisasi aset.

"Kita sudah mendengarkan pandangan dari Penasihat Ekonomi Presiden, Emil Salim dan Widjojo Nitisastro, soal permintaan IMF tersebut. Sementara ini pemerintah masih memfokuskan kepada revisi APBN," kata Purnomo.

Menurut Purnomo, sekuritisasi aset merupakan ide awal untuk mendapatkan satu tambahan pendapatan di mana Indonesia bisa mendapatkan uang tunai di depan untuk pembangunan nasional. Kalau itu masuk ke APBN, akan ada tambahan pendanaan. Ditanya lagi soal kelangsungan sekuritisasi aset, Purnomo tidak menyebutkan apakah akan ditunda atau diteruskan.

Dalam rapat terbatas bidang ekonomi, Kamis lalu, Emil Salim mengatakan, kalangan *board of executive directors* (Dewan Direktur Eksekutif) IMF mengharapkan agar pemerintah tidak melanjutkan rencana tersebut.

Harus diumumkan

Sebelumnya, Dodsworth dan sejumlah pimpinan IMF lain, termasuk Direktur Pelaksana IMF Horst Kohler, mengatakan, IMF hanya akan melanjutkan pembicaraan dengan Indonesia setelah revisi APBN 2001 disetujui kabinet dan DPR, dan Indonesia menyelesaikan sejumlah isu lain.

Sejumlah isu lain itu, menurut Dodsworth pekan lalu, adalah menyangkut amandemen UU BI dan rencana sekuritisasi aset yang selama ini ditentang oleh Bank Dunia, IMF, dan para kreditor Paris Club. Revisi APBN 2001 itu sendiri, hari Senin kemarin sudah mulai dikonsultasikan dengan Panitia Anggaran DPR.

Sedangkan proses amandemen UU BI yang tinggal menyelesaikan pembahasan mengenai Pasal 75 tentang pemberhentian seluruh anggota Dewan Gubernur BI setelah berlakunya amandemen UU BI, belum jelas kelanjutannya sampai sekarang.

Tim Panel Amandemen UU BI telah menyelesaikan tugas dan menyampaikan rekomendasi mereka ke pemerintah bulan lalu. Namun, draf terakhir amandemen UU BI yang disampaikan pemerintah ke DPR, menurut Dodsworth, tidak banyak menyinggung rekomendasi tim panel.

"Ada sesuatu yang harus kita perjelas dulu sebelum kita bisa melanjutkan diskusi kita (mengenai kelanjutan pinjaman)," ujar Dodsworth. Dodsworth juga mendesak agar pemerintah menerbitkan rincian rekomendasi-rekomendasi tim panel yang hingga sekarang belum diumumkan ke media massa.

Untuk isu-isu lain yang juga dipersoalkan IMF, dan selama ini menjadi kendala bagi kelanjutan pencairan pinjaman IMF, Dodsworth menilai, pemerintah telah membuat kemajuan bagus. Termasuk di dalamnya adalah keputusan pemerintah untuk menunda rencana sekuritisasi aset. "Ini membantu menyingkirkan kendala-kendala yang masih tersisa untuk bisa dilanjutkannya pembicaraan (IMF dengan pemerintah)," ujarnya.

Rencana sekuritisasi aset, pertama kali dilontarkan oleh

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Menko Perekonomian Rizal Ramli pada Januari 2001, atau sebulan setelah IMF menunda pencairan pinjaman tahap ketiga senilai 400 juta dollar untuk Indonesia. Jumlah itu merupakan bagian dari paket pinjaman senilai total lima milyar dollar AS untuk tiga tahun yang disetujui oleh IMF, Februari 2000.

Keberatan atas rencana sekuritisasi aset itu sendiri, antara lain didasarkan pada tingginya beban utang Indonesia. "Keprihatinan utama kami adalah kesinambungan utang yang ada di masa mendatang," ujar Dodsworth menunjuk pada utang Indonesia yang sudah sekitar 110 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

(har/gun/tat/Dow Jones)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : TUMION, Theo F
Subjek : INVESTASI / 332.6

Manuver SBI dan Dugaan Kartel

SEBAGAI jawaban atas melemahnya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah secara konsisten menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari level terendah 11 persen, hingga mencapai level tertinggi 16,31 persen hasil lelang terakhir, pekan lalu. Padahal, kita tahu bahwa setiap kenaikan satu persen SBI, secara tidak langsung membebani pemerintah akibat meningkatnya biaya pembayaran kupon obligasi rekapitalisasi perbankan yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 2,3 trilyun.

BI pun tetap konsisten menuding bahwa terpuruknya rupiah akibat faktor politik. Sementara kenaikan suku bunga SBI merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan BI untuk menahan gejolak rupiah. Masalahnya, manuver kenaikan suku bunga toh sama sekali tidak menolong memperbaiki nilai rupiah. Bahkan semakin membuat runyam dunia usaha. Dunia perbankan pun menghadapi ancaman *negative spread*.

Minggu lalu, beberapa surat kabar memberitakan sinyalemen beberapa bank telah membentuk semacam kartel untuk memaksa BI menerima hasil lelang setiap minggunya pada level di mana dunia perbankan masih dapat menikmati selisih antara suku bunga deposito dengan suku bunga SBI.

Benarkah demikian? Sebelum BI memberlakukan sistem lelang dalam penentuan suku bunga SBI, BI menentukan level SBI setiap minggu yang menjadi acuan (*benchmark*) bagi suku bunga pasar uang secara administratif. BI kemudian mengubah sistem tersebut menjadi sistem lelang, di mana peserta lelang yang notabene adalah dunia perbankan, harus membuat penawaran atas tingkat suku bunga dan jumlah, namun masih dalam batas terendah dan tertinggi yang sebelumnya ditentukan BI.

Dengan kata lain, level SBI yang akan menjadi *benchmark* pasar uang tersebut tidak murni ditentukan oleh peserta lelang. BI juga berhak menentukan jumlah dan level tertinggi yang akan diambil dalam lelang tersebut. Alasan lainnya adalah bahwa SBI yang berjangka waktu antara satu sampai tiga bulan itu kemudian tidaklah benar-benar mencerminkan tingkat suku bunga yang tergantung pasar untuk pengertian *government risk*. Karena, praktis SBI dengan jatuh tempo yang demikian singkat, tidak secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder setelah dibeli oleh para *pimary dealer*, melainkan cenderung dipegang hingga jatuh tempo.

Dengan kata lain, perdagangan SBI tersebut, serta levelnya, tidaklah kemudian ditentukan oleh pasar. Praktis level SBI yang berfluktuasi setiap minggunya adalah murni tergantung pada lelang tersebut.

Memang terbuka kemungkinan bagi para *primary dealer* untuk sepakat "main mata" dalam memasukkan level penawaran ke BI pada setiap hari Rabu (hari lelang). Namun, sekali lagi dijelaskan bahwa BI jugalah yang menentukan level terendah dan tertinggi yang boleh ikut lelang serta jumlah yang akan dijual ke pasar.

◆◆◆

SBI ini menjadi bermasalah karena memang sudah melenceng dari tujuannya sebagai instrumen moneter untuk mengontrol likuiditas rupiah di pasar uang (dunia perbankan), dan telah berubah menjadi instrumen investasi yang tidak terbatas pada ba[redacted] mun juga investor institusional dan perorangan. Bahkan juga tidak terbatas hing[redacted] jangkau investor luar ne[redacted]

Jika demikian halnya, mengapa pemerintah tidak segera meluncurkan saja *treasury bills* untuk menggantikan SBI. Dan dengan jelas mengatur tata cara perdagangannya hingga di pasar sekunder.

Dengan begitu, suku bunga yang sebenarnya akan terbentuk khususnya dengan adanya pasar sekunder di mana *treasury bills* tersebut dapat diperdagangkan dengan premium maupun dengan diskonto. Dengan demikian semua pihak akan dapat berpartisipasi untuk menentukan *government risk* yang sebenarnya. Tidak lagi terbatas pada dunia perbankan, dan BI sendiri juga dapat melakukan manuver untuk membeli kembali *bills* tersebut jika menilai harganya tidak pada level yang sebenarnya, ataupun untuk keperluan menjaga likuiditas rupiah di pasar uang.

Mengapa sibuk dengan menyalahkan kondisi politik melulu tanpa berperan lebih *decisive* sesuai tujuan dan tugas utama dari bank sentral itu sendiri? Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, gajah di kelopak mata tidak tampak.

(Theo F Toemion, *Speed Currency*)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 29 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 32 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : TAMBUNAN, Marihot H.
Subjek INO-KLASS : DEWSA / 332.45

Warga Superkaya Indonesia

PERKIRAAN potensi aset *private banking* di Indonesia, ternyata luar biasa fantastis, mencapai 257 milyar dollar AS. Setara Rp 2.570 trilyun, pada kurs Rp 10.000 saja. Jumlah ini masih di atas potensi *private banking* Taiwan yang dikenal merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia.

POTENSI Indonesia tersebut juga merupakan terbesar nomor satu di Asia di luar Jepang. Coba bandingkan dengan aset gabungan seluruh bank umum Indonesia yang pada Desember 2000 lalu hanya mencapai Rp 985 trilyun, kalaupun mau ditambah dengan aset *Bank Sentral* (BI) sebesar Rp 580 trilyun, total Rp 1.565 trilyun, masih kalah jauh.

Perkiraan tersebut mungkin sarat dengan kontroversi. Namun perkiraan itu sendiri dikemukakan satu konsultan terkemuka di dunia yang punya induk di AS, yaitu McKinsey Hongkong. Namun, mari kita telaah lebih lanjut.

Pertama, angka tersebut merupakan perkiraan untuk posisi akhir tahun 1997, ketika kurs rupiah terhadap dollar AS masih berkisar Rp 5.000. Walau dikonversi dengan kurs ini, tetap masih sangat besar, Rp 1.285 trilyun. Pada saat yang sama, aset bank umum nasional hanya Rp 529 trilyun.

Kedua, apakah dengan krisis finansial sejak tahun 1997 dan 1998 jumlah tersebut masih tetap atau malah berkurang? Bisa sebaliknya, malah bertambah. Mengapa?

Oleh karena dana tersebut banyak dalam bentuk valuta asing (terutama dollar AS), sehingga dengan apresiasi dollar AS yang mencapai 200-400 persen, kalau dirupiahkan tetaplah luar biasa. Apalagi pada periode krisis tersebut, suku bunga rupiah pernah "mendekati langit", 70 persen lebih.

Ketiga, walau mengalami krisis, yang muncul justru "anomali". Sejak tahun 1996 sampai 2000, pertumbuhan aset dan deposito perbankan cukup mencengangkan. Data menunjukkan, aset bank tumbuh rata-rata 27,2 persen per tahun, dari Rp 387 trilyun pada Desember 1996 menjadi Rp 985 trilyun pada bulan yang sama tahun 2000.

Pertumbuhan deposito dan tabungan rupiah juga cukup tinggi, tumbuh rata-rata 30,4 persen. Sementara, deposito valas tumbuh lebih besar, rata-rata 33,2 persen. Harap diingat, perkiraan itu dibuat untuk posisi Desember 1997, yaitu satu bulan lebih setelah likuidasi 16 bank umum.

Dilihat dari pertumbuhan jumlah rekening di atas, hasilnya juga konsisten, tumbuh rata-rata 28,8 persen per tahun. Pertumbuhan aset dan deposito yang lebih kecil daripada pertumbuhan rekening menunjukkan bahwa pemilik rekening banyak yang semakin kaya. Hal ini tampak sangat mencolok dari kenaikan deposito nasabah perorangan (individu).

Akhir tahun 1997, deposito rupiah individu baru sebesar Rp 56,9 trilyun. Setahun berikutnya, jumlah ini sudah lebih tiga kali lipat (321 persen), yaitu Rp 182,6 trilyun.

Setelah itu, besaran tersebut bertahan pada kisaran Rp 173 trilyun, walau pernah mencapai puncak Rp 198 trilyun pada Juli 1999. Dilihat dari fakta yang ada, kenaikan spektakuler ini kecil kemungkinan hanya karena konversi deposito/simpanan dollar menjadi rupiah, karena ketika itu tidak sedikit yang terbang ke luar negeri (*capital flight*).

Malah deposito valas pada akhir tahun 1997 dan 1998 hanya naik Rp 2,3 trilyun, yaitu dari Rp 32,9 trilyun menjadi Rp 35,2 trilyun, setelah itu jumlahnya malah turun atau naik tidak signifikan. Lalu, apa artinya krisis?

Keempat, perkiraan dana yang sangat besar itu berasal dari sekitar 64.000 orang *high-net-worth* (HNW) atau kelompok masyarakat super kaya, dalam hal ini didasarkan pada individu atau keluarga yang memiliki *investible assets* setidaknya sebesar 1 juta dollar AS (sekitar Rp 10 milyar).

Dengan potensi aset 257 juta dollar AS, maka rata-rata setiap HNW memiliki *investible assets* sekitar 4 juta dollar AS. Terhadap besaran 64.000 ini—hanya sekitar 0,03 persen dari total penduduk—juga bukan tanpa dasar.

Seorang menteri senior dalam jajaran kabinet sekarang mengatakan—dalam kaitan peningkatan penerimaan pajak—bahwa ada sekitar 61.000 rumah yang memiliki nilai lebih dari satu milyar rupiah.

Nah, kalau rumah saja sudah semewah itu, apa dan berapa "kuda" di garasinya. Lalu, apa saja aset-aset lain (saham, properti, logam mulia, batu permata) yang dimiliki?

Makanya tidak heran, berapa pun harga mobil impor berkelas yang dilepas ke pasaran, laris manis seperti kacang goreng, demikian juga maraknya *outbound (overseas)* travel.

Masih terkait dengan angka 64.000 tadi. KPKPN dikabarkan mengirimkan formulir daftar kekayaan kepada sekitar 60.000 penyelenggara negara.

Ini sebagai gambaran jumlah penyelenggara negara pada masa Orde Baru. Tentu tidak semua penyelenggara negara masuk kelompok kaya raya, karena banyak juga yang ternyata "miskin" sebagaimana yang mereka laporkan.

Namun, kalau lima persen saja atau 3.000 pejabat yang berada "pos basah", maka selama 30 tahun kejayaan orde baru—dengan masa bakti pejabat normal lima tahun—maka sudah ada 18.000 yang "basah kuyup" bermandikan harta.

Pada masa itu, banyak juga pengusaha sukses "binaan" para pejabat. Kalau masing-masing pejabat membina dua-tiga pengusaha (*politically-linked businessman*), sudah ada tambahan 45.000, tidak jauh angka perkiraan tersebut. Jumlah ini belum termasuk wirausahawan dan profesional.

Kelompok masyarakat HNW

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

bisa juga disebut *the wealthy atau mega rich*. Jumlahnya sangat sedikit tetapi asetnya sangat besar—di Indonesia hanya tiga per sepuluh ribu penduduk—sering juga disebut *la creme de la creme* atau ibaratnya susu, mereka berada pada lapisan sangat tipis di bagian atas.

Lapisan ini sangat terkonsentrasi, setidaknya 90 persen, di Jakarta, itu pun kebanyakan di kompleks perumahan eksklusif. Bagaimana perkiraan tersebut setelah terjadi krisis luas dalam bidang ekonomi dan politik yang berlanjut ke era reformasi?

Berdasarkan realita yang nyata kelihatan, sepertinya jumlah HNW tersebut malah bertambah. Sebut saja, misalnya, pengacara/konsultan hukum—termasuk aparat peradilan yang terkait dengan penuntutan dan perkara-perkara kakap—akuntan publik, konsultan restrukturisasi, selebritis/bintang iklan, dan profesional teknologi informasi.

Jangan juga dilupakan sebagian anggota legislatif. Masih banyak indikator lain yang dengan mudah ditemukan di sekeliling kita bahwa "lapisan tipis" tersebut makin tebal.

Uraian tersebut hanya sekadar catatan untuk menunjukkan bahwa perkiraan angka-angka konsultan tersebut "tidak asal-asalan". McKinsey Hongkong, dengan induk di AS dan ada afiliasi di Jakarta, dikenal memiliki reputasi internasional sebagai konsultan khusus perbankan dan berbagai lembaga keuangan. Hal itu dituangkan di buku *Banking in Asia, The End of Entitlement (1999)*.

Kalau kebetulan Anda manajer investasi, *dealer treasury*, pencinta statistik ekonomi-moneter, atau malah pemilik dana tersebut, tentu tidak sulit mempercayai kebenaran angka-angka tersebut.

Dana atau potensi aset yang dimiliki HNW tadi menjadi alasan pertama dan terutama bahwa bisnis *private banking* di Indonesia sangat menjanjikan.

Alasan kedua adalah tingginya ketidakpastian politik dan keamanan serta gejolak sosial politik yang sedang melanda negeri. Namun uang, apalagi dalam jumlah amat sangat besar-akan selalu mencari tempat yang betul-betul "aman" dan dan tidak berisik, seperti kata orang, uang itu tidak bunyi.

Kejadian seperti ini sudah terbukti sejak munculnya krisis terutama bulan Mei 1998, bank-bank asing terkemuka di Jakarta yang memiliki layanan/unit *private banking* kebanjiran *nervous customers* untuk mengamankan dananya. Namun, ada juga yang terbang ke luar negeri.

Alasan ketiga bahwa *private banking* cukup menjanjikan adalah peningkatan "transparansi" dan "penegakan hukum". Walau banyak yang mempertanyakan manfaat pengumuman kekayaan pejabat negara yang dilakukan oleh KPKPN, namun banyak juga penyelenggara negara yang waswas.

Penyebabnya bisa jadi karena secara *culture*—sebagai pejabat publik—masih banyak yang asing dengan pengumuman kekayaan secara terbuka atau mungkin tidak pernah mencatat secara akurat berapa hartanya.

Penyebab lain bisa jadi berkaitan dengan "asal-usul" sebagian sumber kekayaan tersebut. Demikian juga upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagai salah satu cara pemerintah untuk menutup defisit anggaran belanja negara telah menyebabkan adanya usul untuk menghapus pasal kerahasiaan bank.

Perkembangan ini bukan tidak mungkin mengarah pada pengenaan pajak warisan—yang pasti juga sudah diantisipasi para HNW? Nah di sini *private banking* bisa berperan banyak untuk mengamankan atau mengelola kekayaaan para HNW.

Alasan keempat, cepat atau lambat, ekonomi kita akan pulih, yang ditandai antara lain dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang meningkat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga turut meningkatkan orang-orang kaya sekelas HNW. Ketika pertumbuhan ekonomi kita berkisar enam-tujuh persen per tahun (sebelum krisis), banyak orang kaya di tingkat Asia berasal dari Indonesia.

Lalu, kapan pemulihannya? Kalaupun lima atau sepuluh tahun lagi, tidak masalah, karena membangun reputasi *private banking* tidak cukup setahun, apalagi sehari.

◆◆◆

MEMBICARAKAN *private banking* sebenarnya agak "gelap" juga, karena informasi yang didapatkan sering sangat tertutup. Akan tetapi, perlu diluruskan terlebih dulu bahwa *private banking* tidak sama dengan *private bank*.

Yang pertama mengacu pada jenis layanan atau segmen nasabah, dan bisa diterjemahkan sebagai perbankan individual atau perbankan personal, sementara yang kedua mengacu kepada kepemilikan, dan diterjemahkan sebagai bank swasta.

Disebut gelap karena banyak para periset *private banking* mengalami frustrasi untuk menentukan besaran angka-angka yang mendekati kepastian.

Angka-angka yang dirilis para periset juga dalam kenyataannya juga sering *underescore*. Beberapa *private bankers* di Swiss—sejalan dengan McKinsey—memperkirakan pasar *private banking* dunia sekitar 2 triliyun dollar AS. Namun, Citibank AS menyampaikan angka yang lebih besar lagi, mencapai 7 triliyun dollar AS.

Semua ini angka sepuluh tahun lalu, sekarang pasti jauh lebih
sar
oleh perbankan Swiss yang sudah terkenal tradisi dan reputasi ratusan tahun.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh *private banking* untuk tidak menunjukkan aset dan siapa nasabahnya.

Pertama adalah publikasi laporan keuangan yang "mendompleng" dengan bank/perusahaan induk. Agar pelayanan lebih efektif, sebuah bank besar biasanya mendirikan satu anak perusahaan untuk melayani nasabah HNW.

Misalnya, James Capel di London yang merupakan anak perusahaan salah satu bank terkemuka di dunia yang khusus melayani *private client*. Perusahaan seperti ini sewaktu mempublikasi laporan keuangan digabung (konsolidasi) dengan perusahaan induk, sehingga tidak bisa terlacak misalnya berapa total dana—dan jumlah rekening—yang dikelola.

Kedua, *confidentiality/secrecy* (kerahasiaan). Salah satu yang "dijual" oleh *private banking* adalah kerahasiaan yang sangat tinggi tentang segala sesuatu tentang nasabah.

Di beberapa negara, ada beberapa cara untuk menjaga kerahasiaan ini, misalnya, dengan membuka rekening *nominee* (atas nama/institusi lain). Cara lain adalah memberikan nama baru bagi pemilik rekening berupa kombinasi angka-angka, sehingga untuk membuka atau melakukan transaksi rekening tersebut diperlukan "kunci" rahasia, yang hanya diketahui pemilik dan sedikit *relationship manager* (RM) di bank tersebut. Karena itu, tidak heran, logo United Bank of Switzerland (UBS), salah satu *private banking* terkemuka di dunia, adalah kunci dan tidak cuma satu tetapi tiga.

Ketiga, dalam iklan atau promosinya juga sangat selektif. Selain pilihan media, informasi lain juga sangat terbatas, alamat, nomor telepon dan faksimile saja tidak selalu dicantumkan. Daripada jor-joran di koran atau televisi, mereka lebih suka mempergunakan saluran pemasaran yang "betul-betul hening", yaitu situs Internet (pemasaran dengan "word of mouse").

Keempat, pelayanan yang diberikan juga unik, RM-nya yang mendatangi nasabah dengan membawa tas atau *suitcase*, baik ke ruang kerja atau ke kamar hotel nasabah.

Layanan seperti ini, yaitu *cash pick-up* atau *room service*—di Jakarta sudah dilakukan satu bank asing—menyebabkan *private banking* sering juga disebut *suitcase banking*. Kalau sudah *room service* seperti ini, urusannya bukan rekening 10.000 atau 30.000 dollar AS lagi, paling tidak 100.000 dollar AS, dan tu

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

cuma beberapa gepok lembaran 1.000 dollar AS. Cara-cara seperti ini menyebabkan siapa dan bagaimana nasabah *private banking* sulit diketahui.

Private banking sebenarnya tidak beda dengan bisnis perbankan komersial (umum) pada umumnya artinya masih bergerak dalam bidang *funding, lending*, dan jasa-jasa perbankan lainnya. Namun, jelas ada beberapa "modifikasi", berupa perluasan dan pendalaman layanan.

Pertama, target pasarnya sangat tersegmentasi, yaitu nasabah yang super kaya raya atau *high-net-worth (HNW) individual/family*. Untuk menjadi nasabah, beberapa *private banking* mensyaratkan adanya *investable assets* minimal 1 juta dollar AS, tetapi ada juga yang lebih rendah 500.000 dollar AS, atau bahkan 250.000 dollar AS (Rp 2,5 milyar).

Di Jakarta, beberapa bank lokal dengan layanan *private banking* akan dengan senang menerima Anda dengan membuka rekening "hanya" Rp 1 milyar. Namun, yang jelas, nasabahnya adalah kelompok HNW atau berpotensi menjadi HNW, seperti profesional atau eksekutif bergaji besar, profesional bidang IT, *investment banker*, pengacara, konsultan, atau pebisnis.

Kedua, *seamless services*, yaitu jasa atau produk yang ditawarkan sangat lengkap, "tidak terputus" pada produk perbankan lokal seperti deposito rupiah.

Bank umum memang masih dilarang menjual produk pasar modal (saham, reksadana, obligasi), asuransi dan dana pensiun; demikian juga instrumen derivatif serta instrumen investasi lainnya berupa properti, logam mulia, dan batu permata.

Sebagai *private banking*, mereka disyaratkan bisa memenuhi semua itu dan tidak terbatas pada investasi di satu negara (*multi-country*) atau satu valuta (*multi-currency*). Malah, *relationship manager private banking* diharuskan memiliki kemampuan *advisory* dalam bidang perpajakan, pendidikan dan peraturan pembagian warisan, dan strategi investasi, termasuk bila perlu pengisian formulir KPKPN.

Pokoknya, semua permintaan mereka dalam hal *wealth management* wajib dipenuhi, karena mereka bukan lagi sekadar *customers*, tetapi sudah jadi *client*.

Tabel 1 menunjukkan beberapa jenis layanan *private banking* UBS, salah satu bank dengan tradisi *private banking* berusia 125 tahun.

Beberapa *private banking* kelas dunia adalah bank-bank dari Swiss, Inggris, Austria, dan negara Eropa lainnya. Beberapa di antaranya adalah UBS, Swiss Bank Corporation (SBC), Pictet & Cie, Banque Cantonale Vaudoise, HSBC, dan Rabo Robeco Bank.

Bank-bank ini—terutama yang berasal dari Swiss—sangat menekankan *confidentiality* dan sudah menjadi tradisi ratusan tahun (sejak abad 18). Sekadar informasi, Swiss merupakan negara yang memiliki sekitar 20 *private banking* dengan penguasaan pasar 30-50 persen dari aset *private banking* dunia.

Walau potensi bisnis *private banking* di Indonesia luar biasa besar, apa boleh buat, dana tersebut sebagian besar berada di bank-bank luar negeri.

Namun, kemungkinan kembalinya dana-dana besar tersebut perlu diantisipasi dan merupakan momentum yang tepat untuk menangkap klien-klien HNW. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan bisa menangkap peluangnya, toh membangun reputasi tidak semudah membalik tangan.

Dalam kaitan ini, apresiasi patut diberikan kepada bank-bank nasional, baik *government banks* maupun *private banks* (**Tabel 2**) yang telah menjalankan bisnis *private banking*, karena sudah memulai awal yang baik, walau sebagian masih pada tahap embrio.

Selain bank nasional, bank-bank asing yang beroperasi menjalankan *private banking* di Indonesia sudah banyak, yang "kelihatan" saja ada beberapa, seperti ABN, Citibank, HSBC, dan Standard Chartered.

Kelompok bank asing ini sudah menikmati bisnis *private banking* terutama sekitar tiga tahun lalu ketika banyak nasabah-nasabah yang sangat panik menghadapi *chaos* pergantian kepemimpinan nasional, dan gejolak serta krisis sosial politik berkepanjangan. Dan sepertinya, *so far*, merekalah *market leader* dalam segmen ini.

Beberapa bank campuran juga bisa jadi merupakan perpanjangan bank induk yang telah menjalankan bisnis *private banking* di negeri asal, seperti Development Bank of Singapore, Rabo Bank, dan Bangkok Bank.

Lalu, apa untungnya menjalankan bisnis *private banking*? Bagi perekonomian jelas. Terutama adalah dana tetap berputar di Indonesia, tidak terbang ke luar, sehingga dana untuk investasi sedikit banyak bisa terpenuhi. Pajak atas berbagai instrumen investasi (deposito, saham) HNW yang jumlah tidak sedikit bisa menambah kocek pemerintah. Belum lagi kalau banknya membukukan laba, negara mendapatkan pajak penghasilan.

Dari pengalaman beberapa bank yang menjalankan bisnis *private banking* setidaknya ada dua formula sukses, yaitu segmentasi dan *relationship manager* yang tepat. Apa pun bisnis yang dijalankan, segmentasi menjadi syarat utama. Di sini bank harus betul-betul "mengenal" siapa nasabah, dari mulai umur, status, latar belakang, dan aspek psikografis lainnya. Hal ini penting, karena dalam bisnis dikenal hukum besi, *focus or perish* (fokus atau mampus).

(Marihot H Tambunan, *pengamat perbankan dan Staf pengajar Program Magister Manajemen di sebuah perguruan tinggi di Jakarta*)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Tabel 1
LAYANAN "PRIVATE BANKING" UNITED BANK OF SWITZERLAND (UBS)

No	Jenis layanan (services)	Keterangan
1	Portfolio Management	Strategi investasi sesuai dengan "goal & needs" nasabah.
2	Active Advisory	Analisa dan optimalisasi risiko/ "Return" Investasi.
3	Financial Planning & Wealth Management (WM)	Perencanaan keuangan termasuk urusan pembagian warisan, "succession planning", legal, dan perpajakan.
4	Art Banking	Manajemen koleksi lukisan, batu permata, logam mulia, barang antik, pergelaran seni, budaya, dan konser.
5	Sports & Entertainment Group	Pelayanan khusus kepada atlet dan artis, entertainer.
6	Investment Funds	Investasi di berbagai saham, surat berharga, obligasi, real estat, dan reksadana.

Sumber: www.ubs.com (Mei 2001, Diolah)

Tabel 2
LAYANAN "PRIVATE BANKING" DI INDONESIA

No	Bank	Nama Layanan
1	BANK BNI	Layanan Prima
2	BANK LIPPO	VIP Banking
3	BANK MANDIRI	Priority Banking
4	BANK NIAGA	Individual Banking
5	BANK UNIVERSAL	Preferred Banking
6	ABN-AMRO	Preferred Banking
7	CITIBANK	Private Banking
8	HSBC	Premier Banking
9	STANDARD CHARTERED	Priority Banking

Sumber: Berbagai Media Massa dan Sumber Lain (Diolah)